



Evaluasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) di Provinsi Papua Selatan

Adriana Mendila ¹, Alexander P. Tjilen ², Nur Jalal ³

¹³². *Administrasi Publik Program Magister, Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Papua Selatan 99611, Indonesia*

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Higher Education Affirmation Program (ADik) in South Papua Province, by assessing six sub-variables including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection through interviews, observations, and documentation. With a total of 13 (thirteen) informants, the results of the interviews were analyzed with 3 (three) main components: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the evaluation of the implementation of the Higher Education Affirmation Program in South Papua Province. There are 6 (six) variables studied and analyzed using the William N. Dunn evaluation model: First, the effectiveness of the ADIK program has succeeded in increasing access to education for the Papuan people, although there are several obstacles in terms of academic readiness and social adaptation of students. Expansion of financial support to cover student needs. Second, efficiency shows that although the allocation of funds is sufficient, its distribution is often late and suboptimal, disrupting the smoothness of the educational process, but is constrained by living costs that have not been fully addressed. Third, the adequacy of this program has succeeded in providing sufficient financial support for students, but the main challenge is the limited educational facilities in some areas. Fourth, equity, although this program is intended for many Indigenous Papuan students (OAP) who still face difficulties in meeting their living needs for students throughout South Papua, the distribution is more concentrated in Merauke, while remote areas are still less accessible. Fifth, the program's responsiveness to student needs can be improved, especially in terms of psychosocial and academic support. Sixth, although this program is in line with the objectives of affirmative action policies, there are differences in implementation that do not take into account diverse local cultural contexts.

Keywords: Evaluation, Higher Education, Effectiveness.

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di Provinsi Papua Selatan, dengan menilai enam sub-variabel yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dengan jumlah informan sebanyak 13 (tiga belas) orang hasil wawancara dianalisa dengan 3 (tiga) komponen utama reduksi data penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi di Provinsi Papua Selatan. Ada 6 (enam) variabel yang diteliti dan dianalisa dengan model evaluasi William N. Dunn : Pertama, efektivitas program ADIK berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Papua, meskipun ada beberapa hambatan dalam hal kesiapan akademik dan adaptasi sosial mahasiswa. Perluasan dukungan finansial untuk mencakup kebutuhan mahasiswa. Kedua, efisiensi menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana sudah cukup memadai, distribusinya sering terlambat dan tidak optimal, mengganggu kelancaran proses pendidikan, namun terkendala pada biaya hidup yang belum sepenuhnya tertangani. Ketiga, kecukupan program ini berhasil menyediakan dukungan finansial yang cukup bagi mahasiswa, namun tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas pendidikan di beberapa daerah. Keempat pemerataan meskipun program ini diperuntukkan masih banyak mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka bagi mahasiswa di seluruh Papua Selatan, sebarannya lebih banyak terkonsentrasi di Merauke, sementara daerah-daerah terpencil masih kurang terjangkau. Kelima, responsivitas program terhadap kebutuhan mahasiswa dapat ditingkatkan, terutama dalam hal dukungan psikososial dan akademik. Keenam, ketepatan meskipun program ini sesuai dengan tujuan kebijakan afirmasi, terdapat perbedaan dalam penerapan yang tidak mempertimbangkan konteks budaya lokal yang beragam.

Kata Kunci: Kata Kunci : Evaluasi, Pendidikan Tinggi, Efektivitas.

¹ **CONTACT:** adriana@gmail.com

DOI: <https://10.35724/mjpa.v8i1.7293>

1. Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan fondasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika global. Dalam kerangka pembangunan nasional, pendidikan tinggi tidak hanya diposisikan sebagai sarana peningkatan kapasitas individu dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat identitas kebangsaan, memperluas partisipasi sosial, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan (Adia, 2023). Di era globalisasi yang ditandai oleh persaingan sumber daya manusia dan kompleksitas persoalan sosial, kualitas serta aksesibilitas pendidikan tinggi menjadi indikator utama kemajuan suatu bangsa (Ainscow, 2020). Namun, realitas pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa akses dan mutu pendidikan tinggi masih belum merata, terutama antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur, yang mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran Provinsi Papua merepresentasikan tantangan nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di wilayah tertinggal. Kondisi geografis yang terisolasi, keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi, serta karakteristik sosial budaya masyarakat adat menjadi faktor penghambat utama dalam mengakses pendidikan tinggi (Ainscow, 2020). Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah menyebabkan banyak keluarga belum mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka ke jenjang perguruan tinggi (Becker & Huselid, 2018). Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk intervensi seperti beasiswa dan subsidi pendidikan, akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua di Papua Selatan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan terpencil. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan akses formal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan geografis wilayah sasaran (Bitar & Davidovitch, 2024).

Sebagai respons terhadap ketimpangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menginisiasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) sebagai kebijakan afirmatif yang bertujuan memperluas dan pemeratakan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya masyarakat asli Papua. Program ADik dirancang melalui pemberian dukungan pembiayaan, kuota khusus penerimaan mahasiswa, serta fasilitasi akademik dan non-akademik agar mahasiswa mampu menyelesaikan studi secara berkelanjutan (Karsenty, 2019). Namun, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun Program ADik berhasil meningkatkan akses pendidikan tinggi secara administratif, implementasinya masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti keterlambatan pencairan dana, rendahnya kesiapan akademik mahasiswa, lemahnya sistem pendampingan, serta kurangnya sensitivitas terhadap konteks sosial budaya lokal (Goldstein, 2021). Kajian-kajian tersebut umumnya bersifat parsial dan belum secara komprehensif mengevaluasi pelaksanaan Program ADik di Provinsi Papua Selatan sebagai wilayah pemekaran baru dengan karakteristik yang unik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di Provinsi Papua Selatan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, guna memberikan gambaran empiris mengenai kinerja kebijakan serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi penguatan kebijakan afirmasi pendidikan tinggi yang lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan.

2. Studi Literatur

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk merespons berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Anderson (2015) memandang kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui regulasi, alokasi sumber daya, maupun pelaksanaan program-program publik. Dalam pengertian ini, kebijakan publik berfungsi sebagai jembatan antara tujuan politik dan implementasi praktis dalam rangka menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan publik tidak hanya dipahami dari hasil akhir yang dicapai, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Birkland (2020) menekankan bahwa kebijakan publik mencakup tidak hanya keputusan formal pemerintah, tetapi juga keseluruhan proses di mana keputusan tersebut dirumuskan, dinegosiasikan, dan dilaksanakan melalui interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan produk kolektif yang merefleksikan dinamika kepentingan, nilai, serta aspirasi masyarakat dalam konteks tertentu.

Untuk memahami bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan, para ahli mengembangkan berbagai model kebijakan. Peters, (2019) menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan tidak selalu berlangsung secara linear dan rasional. Model rasional menggambarkan kebijakan sebagai hasil dari analisis sistematis terhadap masalah, alternatif, dan konsekuensi kebijakan, sehingga keputusan diambil berdasarkan pertimbangan logis dan berbasis bukti. Namun, dalam praktiknya, pengambilan keputusan sering kali tidak sepenuhnya rasional. Model incremental menunjukkan bahwa kebijakan lebih sering mengalami perubahan kecil dan bertahap dari kebijakan yang sudah ada, mencerminkan keterbatasan waktu, informasi, dan kapasitas pengambil keputusan. Sementara itu, model garbage can

menggambarkan proses kebijakan sebagai hasil dari pertemuan acak antara masalah, solusi, dan aktor, sehingga kebijakan dapat muncul tanpa perencanaan yang sistematis. Model koalisi advokasi menyoroti peran kelompok kepentingan dan jaringan aktor yang membentuk koalisi untuk memengaruhi arah kebijakan sesuai dengan nilai dan kepentingan yang mereka perjuangkan. Keberagaman model ini menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor teknis, politik, serta sosial.

Proses pembuatan kebijakan publik umumnya dipahami sebagai suatu siklus yang berkelanjutan. Ramesh & Howlett (2018) menjelaskan bahwa siklus kebijakan mencakup tahapan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Identifikasi masalah menjadi tahap awal yang krusial karena menentukan arah kebijakan yang akan dirumuskan. Tanpa pemahaman yang tepat terhadap masalah, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak efektif. Tahap perumusan kebijakan melibatkan pengembangan berbagai alternatif solusi serta pertimbangan terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan, dengan melibatkan pemangku kepentingan agar kebijakan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahap paling menentukan karena kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik. Pada tahap ini sering muncul berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya dukungan politik, yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Evaluasi kebijakan kemudian dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai serta mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai penilaian akhir, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran untuk menyempurnakan kebijakan di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang dinamis dan kompleks yang melibatkan berbagai aktor, model, dan tahapan yang saling berkaitan. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, model, dan proses kebijakan publik menjadi penting bagi peneliti dan pembuat kebijakan dalam merancang serta mengevaluasi kebijakan yang efektif, responsif, dan berkeadilan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang kebijakan publik menjadi landasan penting untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) sebagai kebijakan afirmatif yang bertujuan mengatasi ketimpangan akses pendidikan tinggi di Provinsi Papua Selatan.

2.2 Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan program, tetapi juga sebagai dasar pertanggungjawaban kebijakan kepada pihak yang berwenang serta sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Anderson dalam Winarno (2008) memandang evaluasi sebagai kegiatan yang mencakup penilaian terhadap substansi kebijakan, proses implementasi, serta dampak yang ditimbulkan. Pandangan ini menegaskan bahwa evaluasi tidak berhenti pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan kesenjangan antara perencanaan dan realitas pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi sebagai kegiatan pengumpulan informasi mengenai bekerjanya suatu program yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Suchman memandang evaluasi sebagai proses penentuan hasil dari kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, sementara Stufflebeam menekankan evaluasi sebagai upaya penyediaan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan (Harnisch, 2020). Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan mengukur, menilai, dan menganalisis program atau kebijakan guna mengetahui tingkat ketercapaian tujuan serta merumuskan langkah tindak lanjut yang tepat.

Program sendiri dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mengimplementasikan kebijakan dalam jangka waktu tertentu dan melibatkan berbagai unit serta aktor pelaksana. Dalam konteks evaluasi, program dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling terkait dan berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi program tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan proses dan keterkaitan antar unsur dalam program tersebut (Karsenty, 2019). Setiap program harus diakhiri dengan evaluasi untuk memastikan apakah program tersebut telah menjalankan fungsinya sebagaimana yang direncanakan serta untuk menentukan apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Evaluasi program juga memiliki tujuan strategis dalam mendukung pengambilan keputusan kebijakan. Mulyatiningsih (2011) menjelaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk menunjukkan kontribusi program terhadap pencapaian tujuan organisasi serta menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan program. Dalam konteks ini, evaluasi program dapat dipahami sebagai bentuk penelitian evaluatif yang berorientasi pada penilaian mutu dan ketercapaian tujuan program berdasarkan kriteria tertentu. Perbedaan utama antara penelitian dan evaluasi program terletak pada orientasi akhirnya, di mana penelitian berfokus pada deskripsi dan penjelasan fenomena, sedangkan evaluasi program diarahkan pada pengambilan keputusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Manfaat utama evaluasi program terletak pada kemampuannya menyediakan informasi yang objektif dan berbasis data bagi pengambil keputusan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghentikan program yang tidak efektif, merevisi program yang memiliki kelemahan tertentu, melanjutkan program yang terbukti bermanfaat, atau bahkan mereplikasi program yang berhasil di wilayah lain. Dengan demikian, evaluasi program berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi program dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perancangan rencana evaluasi, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis tingkat keberhasilan program, hingga penyusunan rekomendasi dan

pelaporan hasil evaluasi. Pendekatan sistem dalam evaluasi menjadi penting karena program merupakan suatu kesatuan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Evaluasi yang dilakukan secara sistemik memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kinerja program serta identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi.

Dalam kajian evaluasi program, berbagai model evaluasi telah dikembangkan untuk memberikan kerangka analisis yang lebih terstruktur. Model-model evaluasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan kebijakan. Beberapa model evaluasi menekankan pencapaian tujuan program, sementara model lainnya menyoroti dampak yang muncul tanpa terikat pada tujuan awal. Ada pula model yang membedakan evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu evaluasi formatif untuk perbaikan selama program berlangsung dan evaluasi sumatif untuk menilai hasil akhir program. Model-model evaluasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang sesuai dengan kebutuhan dan konteks kebijakan yang dievaluasi.

Dalam konteks penelitian ini, evaluasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di Provinsi Papua Selatan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Model evaluasi Dunn dipilih karena menawarkan pendekatan yang komprehensif dengan menekankan enam dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi menilai optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program. Kecukupan mengukur apakah hasil program mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi, sementara pemerataan menilai keadilan distribusi manfaat program kepada kelompok sasaran. Responsivitas digunakan untuk menilai tingkat kepekaan program terhadap kebutuhan dan harapan penerima manfaat, sedangkan ketepatan menilai kesesuaian program dengan nilai sosial, budaya, dan norma yang berlaku.

Secara keseluruhan, model evaluasi Dunn memberikan kerangka analisis yang holistik dan relevan untuk mengevaluasi kebijakan publik, khususnya kebijakan afirmasi pendidikan tinggi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan tantangan implementasi Program ADik di Provinsi Papua Selatan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kebijakan afirmasi pendidikan tinggi di masa mendatang.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini menggunakan beberapa konseptual untuk membantu dalam menganalisis permasalahan yaitu:

1. Evaluasi Program Pendidikan Tinggi Afirmasi ADik di Provinsi Papua Selatan, merupakan upaya sistematis untuk menilai keberhasilan program dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP). Evaluasi dilakukan berdasarkan enam aspek model William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak program dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
2. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan atau program berhasil dicapai. Dalam konteks Program ADIK, efektivitas diukur dari keberhasilan program dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP). Program dikatakan efektif apabila jumlah partisipasi OAP dalam perguruan tinggi meningkat secara signifikan setelah program dijalankan. Indikator lain dapat berupa kelulusan, keberlanjutan studi, dan keberhasilan akademik penerima program. Evaluasi efektivitas penting untuk memastikan bahwa program memberikan dampak nyata sesuai tujuannya.
3. Efisiensi mengacu pada perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakan. Program ADik akan dinilai efisien apabila mampu memberikan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal, baik dari segi anggaran, waktu, maupun tenaga. Evaluasi efisiensi juga mempertimbangkan aspek pengelolaan dan pelaksanaan teknis program. Program yang efisien akan meminimalkan pemborosan dan memastikan alokasi anggaran tepat guna. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan program di masa depan.
4. Kecukupan adalah kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan dasar sasaran kebijakan. Dalam Program ADik, kecukupan dievaluasi berdasarkan apakah beasiswa, fasilitas pendukung, dan bantuan lainnya benar-benar mencukupi kebutuhan mahasiswa OAP. Program dikatakan cukup apabila mampu menunjang studi mahasiswa tanpa menyebabkan beban ekonomi tambahan. Indikator kecukupan meliputi jumlah bantuan, kualitas fasilitas, dan keberlanjutan dukungan. Evaluasi ini berguna untuk memastikan bahwa program tidak hanya tersedia, tetapi juga memadai.
5. Pemerataan berarti keadilan dalam distribusi manfaat program kepada seluruh kelompok sasaran. Dalam konteks Program ADik, pemerataan dilihat dari distribusi peserta dari berbagai wilayah di Provinsi Papua Selatan, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program harus menjangkau seluruh OAP secara adil, tanpa diskriminasi wilayah atau latar belakang sosial. Pemerataan juga mencakup proporsi yang seimbang antara

laki-laki dan perempuan serta antar etnis lokal. Evaluasi aspek ini penting untuk menjamin bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan.

6. Responsivitas merujuk pada kemampuan program untuk menanggapi kebutuhan, harapan, dan masalah yang muncul di lapangan. Dalam evaluasi Program ADik, responsivitas diukur dari kecepatan dan ketepatan tanggapan pihak pelaksana terhadap keluhan atau kebutuhan mahasiswa dan institusi pendidikan. Program yang responsif mampu menyesuaikan kebijakan pelaksanaan secara dinamis berdasarkan realitas yang ada. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif antara pelaksana dan penerima manfaat. Responsivitas mencerminkan kualitas hubungan pelayanan publik.
7. Ketepatan berarti kesesuaian antara program yang dijalankan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan lokal sasaran. Dalam Program ADik, ketepatan dapat dilihat dari apakah sasaran penerima beasiswa benar-benar berasal dari kelompok OAP yang membutuhkan serta apakah metode pelaksanaan program sesuai dengan kondisi geografis dan sosial wilayah Papua Selatan. Evaluasi ketepatan bertujuan untuk memastikan bahwa program tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi benar-benar sesuai dan relevan dengan kebutuhan lokal. Ketepatan juga mencerminkan nilai keberlanjutan dan keberterimaan program di tengah masyarakat.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses implementasi program, dinamika yang terjadi di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta capaian yang dihasilkan dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program, penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan Dunn sebagai kerangka analisis utama, yang menekankan aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam Program ADik, antara lain pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, pengelola pendidikan afirmasi, mahasiswa penerima manfaat, serta orang tua mahasiswa. Selain wawancara, observasi langsung terhadap konteks pelaksanaan program dan studi dokumentasi terhadap kebijakan, pedoman pelaksanaan, serta laporan resmi program turut dilakukan untuk memperkaya dan memperkuat data penelitian. Penerapan triangulasi metode digunakan untuk meningkatkan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas implementasi Program ADik di tingkat provinsi. Waktu penelitian berlangsung selama dua bulan, yaitu pada Mei hingga Juni 2025. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci dan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, laporan institusional, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan dan reflektif sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai efektivitas pelaksanaan Program ADik serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di Provinsi Papua Selatan.

4. Hasil & Pembahasan

Evaluasi pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di Provinsi Papua Selatan menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mampu mengurangi ketimpangan akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP). Mengingat kompleksitas kondisi geografis dan sosial ekonomi wilayah, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Oleh karena itu, pembahasan ini menganalisis kinerja Program ADik berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, kecukupan, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian dan tantangan program. Efektivitas

- 1) Kecukupan, meskipun Program ADik efektif membuka akses pendidikan tinggi, tingkat kecukupan dukungan finansial yang diberikan masih belum sepenuhnya memadai. Beasiswa yang tersedia umumnya hanya mencakup biaya pendidikan, sementara biaya hidup, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari masih menjadi beban bagi mahasiswa OAP, khususnya yang berasal dari daerah terpencil. Kondisi ini berpotensi mengganggu konsentrasi akademik karena sebagian mahasiswa harus mencari sumber pendapatan tambahan. Oleh karena itu, kecukupan program perlu ditingkatkan melalui dukungan finansial yang lebih komprehensif serta penguatan pendampingan sosial selama masa studi.
- 2) Efisiensi, program ADik menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Dengan anggaran yang relatif terbatas, program ini mampu meningkatkan jumlah penerima

manfaat dan mempertahankan keberlanjutan studi mahasiswa OAP. Pengalokasian dana yang terfokus pada kebutuhan utama pendidikan menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran. Efisiensi ini tercermin dari dampak yang dihasilkan, yaitu peningkatan akses dan partisipasi pendidikan tinggi tanpa pemborosan sumber daya.

- 3) Pemerataan, aspek pemerataan dalam pelaksanaan Program ADik masih menghadapi kendala, terutama dalam distribusi informasi kepada masyarakat OAP di wilayah terpencil. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan ketergantungan pada penyampaian informasi secara informal menyebabkan tidak semua masyarakat memperoleh informasi program secara merata. Hal ini berdampak pada ketimpangan partisipasi antardaerah. Oleh karena itu, pemerataan akses perlu diperkuat melalui strategi komunikasi yang lebih inklusif dan pelibatan aktor lokal agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.
- 4) Responsivitas, responsivitas Program ADik terhadap kebutuhan dan keluhan mahasiswa OAP masih belum optimal. Keterbatasan saluran komunikasi serta lambatnya penanganan permasalahan administratif menjadi kendala yang sering dihadapi mahasiswa. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepuasan dan motivasi belajar mahasiswa. Peningkatan responsivitas program memerlukan penguatan mekanisme komunikasi, percepatan penanganan keluhan, serta pendampingan akademik dan administratif yang lebih intensif dan berkelanjutan.
- 5) Ketepatan, ketepatan pelaksanaan Program ADik masih menghadapi tantangan dalam penyesuaian pendekatan pembelajaran dengan karakteristik sosial dan budaya OAP. Model pendidikan tinggi yang dominan bersifat teoritis belum sepenuhnya selaras dengan budaya belajar masyarakat OAP yang lebih berbasis pengalaman dan komunitas. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi proses adaptasi dan keberhasilan akademik mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih kontekstual, aplikatif, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal agar tujuan program afirmasi dapat tercapai secara optimal.

5. Kesimpulan

Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di Provinsi Papua Selatan terbukti meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dengan mengurangi hambatan biaya pendidikan dan keterbatasan informasi. Namun, efektivitas program masih dibatasi oleh belum tercukupinya biaya hidup mahasiswa yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh beasiswa. Perluasan dukungan finansial untuk mencakup kebutuhan hidup menjadi penting agar mahasiswa dapat fokus pada studi tanpa tekanan ekonomi. Dari sisi efisiensi, Program ADik mampu mengelola anggaran secara relatif tepat sasaran meskipun dengan sumber daya terbatas, terutama dalam pembiayaan kuliah dan beasiswa. Kendati demikian, keterbatasan dukungan biaya hidup masih memaksa sebagian mahasiswa bekerja paruh waktu, sehingga penyesuaian alokasi anggaran diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan studi. Kecukupan program juga masih menjadi tantangan karena beasiswa yang tersedia umumnya hanya mencakup biaya pendidikan, sementara kebutuhan transportasi dan akomodasi belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, kebijakan beasiswa perlu disempurnakan agar lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi mahasiswa OAP. Selain itu, pemerataan akses informasi program masih belum optimal, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur komunikasi. Penguatan saluran komunikasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas diperlukan agar informasi program dapat diterima secara merata. Responsivitas program terhadap kebutuhan dan keluhan mahasiswa juga perlu ditingkatkan melalui penyediaan saluran komunikasi yang mudah diakses serta pendampingan akademik dan administratif yang lebih intensif. Terakhir, pendekatan pembelajaran yang terlalu teoritis perlu disesuaikan dengan karakteristik budaya belajar OAP melalui integrasi metode pembelajaran yang lebih praktis, kontekstual, dan berbasis pengalaman.

5. Daftar Pustaka

- [1] Adia. (2023). *Strategi Adaptasi Sosial Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah di Sekolah*. Universitas Sebelas Maret Press.
- [2] Ainscow, M. (2020). Making sense of inclusive education: A journey of learning. *International Journal of Inclusive Education*, 24(3), 271–283. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1701420>
- [3] Anderson, J. E. (2015). *The Politics of Public Policy*. Cengage Learning.
- [4] Becker, B. E., & Huselid, M. A. (2018). High-performance work systems and organizational performance: The mediating role of human capital. *Journal of Applied Psychology*, 103(7), 850–865. <https://doi.org/10.1037/apl0000279>
- [5] Birkland, T. A. (2020). *An Introduction to the Policy Process*. Routledge.
- [6] Bitar, N., & Davidovitch, N. (2024). Cultural Adaptation of Digital Learning Tools in Israeli Higher Education: A Case Study of Lecturer Perceptions and Practices. *TechTrends*, 68(6), 1152–1165. <https://doi.org/10.1007/s11528-024-01007-3>
- [7] Goldstein, R. (2021). The efficiency of resource allocation in higher education: A framework for evaluating educational programs. *International Journal of Educational Management*, 35(6), 1092–1109.

<https://doi.org/10.1108/IJEM-09-2020-0373>

- [8] Harnisch, T. L. (2020). *Improving College Completion: Best Practices for Educators and Policymakers*. Routledge.
- [9] Karsenty, J. (2019). Penyuluhan Pendidikan Berbasis Komunitas: Pengaruhnya terhadap Kesuksesan Program Beasiswa. *Pendidikan Masyarakat*, 18(3), 120–130.
- [10] Peters, B. G. (2019). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism*. Edward Elgar Publishing.
- [11] Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.